

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 80-an sumber utama pendapatan negara Indonesia berasal dari pertambangan, khususnya minyak bumi. Mengingat minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga sejak tahun 80-an minyak bumi tak lagi menjadi prioritas utama penopang pendapatan negara dan yang menjadi prioritas utama adalah pajak (disadur dari www.kompasiana.com, 2016). Bisa dibayangkan saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional namun penerimaan pajak setiap tahunnya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sejak 2009, penerimaan negara dari pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 565 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 577 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2010 sebesar Rp 650 triliun, di bawah target Rp 661 triliun. Pada 2011, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 872 triliun, di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 878 triliun. Realisasi pajak tahun 2012 mencapai Rp 835 triliun sementara target APBN 2012 sebesar Rp 900 triliun. Pada tahun 2013, realisasi penerimaan sektor pajak sebesar Rp1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun capaian tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp1.148,4 triliun. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3

triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. Pada tahun 2015, pemerintah mampu merealisasikan penerimaan pajak senilai Rp 1.055 triliun. Jumlah tersebut hanya mencapai 81,5 persen dan tidak mencapai target dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang tercatat sejumlah Rp 1.294,25 triliun (disadur dari www.liputan6.com, 2016). Penerimaan pajak ini diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya untuk mengimbangi pembiayaan yang juga terus meningkat.

Salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara adalah dengan melakukan modernisasi sistem perpajakan. Orang-orang yang tepat dan berkualitas dibutuhkan untuk menyempurnakan sistem. Kepala Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa seharusnya Indonesia memiliki pegawai pajak sejumlah 60 ribu orang hingga 4 tahun ke depan. Diperkirakan sekitar 30 ribu pegawai pajak dibutuhkan saat ini. Akan tetapi kebutuhan pegawai pajak tidak dapat terpenuhi, mengingat sumber daya manusia dibidang perpajakan dibutuhkan tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga di dalam bidang perpajakan lainnya.

Jumlah penduduk Indonesia yang selalu tumbuh setiap tahunnya, juga diikuti dengan jumlah wajib pajak yang semakin bertambah namun tanpa diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga ahli di bidang akuntansi dan perpajakan. Hingga saat ini jumlah pegawai pajak per 2015 hanya 32.000 orang dari 28.000.000 wajib pajak baik orang maupun badan usaha. Data pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia per 2015 hanya 6000 orang, artinya 1 orang pegawai pajak di Indonesia melayani sekitar 4500 wajib pajak. Sehingga sangat kurang representatif untuk mengefektifkan layanan pajak di Indonesia (disadur dari

www.bhataramedia.com, 2016). Dapat disimpulkan bahwa Peluang kerja di bidang pajak masih sangat luas, tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, namun juga pada bidang perpajakan lainnya seperti konsultan pajak, *tax specialist* dan tenaga pengajar pajak.

Hal lain yang menyebabkan penerimaan pajak tidak maksimal adalah terdapat oknum-oknum pegawai pajak yang bertindak curang dan membuat masyarakat merasa kurang percaya untuk membayar pajak. Pada bulan Januari 2016, Dirkrimsus Polda Metro Jaya mengungkap praktik penggelapan pajak yang dilakukan oknum pegawai Dinas Perpajakan DKI Jakarta berinisial RD, SAD dan RM. Ketiga orang ini menjadikan 75 hotel di daerah Jakarta Barat sebagai target aksinya. Diketahui ketiga tersangka terancam dijerat Pasal 12 huruf a, b dan e Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3, 4 dan 5 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan atau pasal 368 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu pelayanan fiskus. Selama ini penerimaan pajak tidak mencapai target karena kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak, serta banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar dan tidak memiliki NPWP. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment* yang masih diterapkan

sampai dengan sekarang. Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

Wajib pajak di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (*tax gap*) dan *tax ratio* Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 12,6 persen untuk tahun 2011 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Media Indonesia, 2011). Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar.

Dalam memenuhi kewajibannya kebanyakan wajib pajak memerlukan bantuan dari pihak ketiga yaitu konsultan pajak, dapat dikatakan bahwa profesi konsultan pajak di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Berdasarkan fakta yang ada di Indonesia, jumlah tenaga konsultan pajak di Indonesia sampai dengan saat ini sebanyak 3.600 konsultan dan jumlah wajib pajak mencapai 28 juta. Sebagai perbandingan, jumlah konsultan pajak di Australia sekitar 38.000 konsultan dan jumlah wajib pajak dipastikan kurang dari jumlah yang ada di Indonesia, sementara

di Jepang tidak kurang dari 70.000 konsultan dan jumlah wajib pajak sebanyak 80 juta. Untuk satu konsultan pajak di Indonesia setidaknya menangani 7.778 orang wajib pajak, sedangkan di Jepang untuk satu konsultan pajak menangani 1.143 orang wajib pajak. Dengan perbandingan jumlah wajib pajak yang ditangani oleh satu konsultan pajak yang ada di Indonesia dan Jepang maka dapat disimpulkan pangsa pasar untuk jasa konsultan pajak di Indonesia masih sangat luas (disadur dari www.kemenkeu.go.id, 2016).

Menghadapi permasalahan atas keterbatasan jumlah pekerja di bidang pajak yang menyebabkan rendahnya pelayanan dan penerimaan pajak tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan akuntansi. Selama masa perkuliahan mahasiswa akuntansi telah mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan. Keputusan pemilihan berkarier bagi lulusan mahasiswa akuntansi tidak tertutup pada bidang akuntansi saja seperti auditor eksternal, auditor internal, *controlling* akan tetapi mahasiswa akuntansi juga dapat berkarier di bidang perpajakan. Mahasiswa akuntansi seharusnya sudah sejak awal memikirkan karier apa yang akan dijalani nantinya termasuk karier dibidang perpajakan atau akuntansi perpajakan dengan tetap dapat menerapkan ilmu yang didapat selama dibangku kuliah. Untuk itu agar terdapat menghadapi ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan yang terbatas lulusan terdidik harus memikirkan karier apa yang harus dijalankannya.

Pemilihan sebuah karier bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari pembentuk karier tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan karier bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak pilihan

profesi yang dapat dijalani oleh mereka seperti bidang perpajakan. Banyak realitas yang terjadi di dunia kerja yang mengharuskan lulusan akuntansi dalam mempertimbangkannya. Perkembangan dunia usaha memberikan lapangan kerja yang beragam bagi angkatan kerja. Salah satu angkatan kerja yang ada di Indonesia adalah sarjana ekonomi, khususnya dari jurusan akuntansi. Perkembangan dalam dunia usaha harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan sudah siap pakai dalam dunia kerja

Seorang mahasiswa dalam merencanakan kariernya tentu mempunyai pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan karier yang akan dipilih. Hal apa yang menjadi latar belakang pemilihan karier tersebut dan apa yang diharapkan mahasiswa dari pilihannya tersebut merupakan pertanyaan penting dalam pemilihan karier. Dalam penelitian Rahayu, dkk (2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier terdiri dari penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. Muliando dan Mangoting (2014) menyebutkan terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pemilihan karier konsultan pajak antara lain, penghargaan finansial, pengakuan profesional, pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan orangtua. Meliana (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi yang membahas faktor nilai intrinsik, pertimbangan pasar kerja, personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, pengakuan profesional dan pelatihan profesional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karier mahasiswa dan karier apa yang akan mereka jalani merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena dengan diketahuinya pilihan karier yang diminati mahasiswa, maka dapat diketahui mengapa seseorang memilih karier tersebut (Rahayu dkk, 2003). Minat dan rencana karier yang jelas akan sangat berguna dalam penyusunan program agar materi kuliah dapat disampaikan secara efektif bagi mahasiswa yang memerlukannya (Rasmini, 2007). Apabila dapat diketahui karier mahasiswa akuntansi, maka pendidikan akuntansi dapat merencanakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sehingga apabila mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya atau lulus, maka mahasiswa diharapkan lebih mudah menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya dengan tuntutan pekerjaan.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis pemilihan karier yang akan dipilih oleh responden. Jenis pemilihan karier yang akan digunakan oleh peneliti adalah pemilihan karier di bidang perpajakan, sedangkan jenis pemilihan karier yang digunakan pada penelitian terdahulu kebanyakan adalah pemilihan karier sebagai akuntan dan non akuntan, akuntan publik dan auditor.

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nilai Intrinsik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Nilai-Nilai Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemilihan Karier Mahasiswa S1 Akuntansi di Bidang Perpajakan (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi di 3 Universitas di Jakarta).**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam pemilihan karier di bidang pajak antara lain :

1. Penerimaan pajak di Indonesia yang sejak tahun 2009 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Fenomena banyaknya permintaan akan tenaga kerja di bidang perpajakan namun tidak sebanding akan jumlah tenaga kerja di bidang pajak yang jauh lebih sedikit.
3. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi pemilihan karier mahasiswa.

C. Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah yang dikhususkan untuk diteliti adalah **Pengaruh Nilai Intrinsik Pekerjaan, Lingkungan Kerja, Nilai-Nilai Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemilihan Karier Mahasiswa S1 Akuntansi di Bidang Perpajakan**. Indikator variabel pengaruh nilai intrinsik pekerjaan yaitu mempunyai tantangan intelektual, suasana kerja dinamis, kreativitas dan pemberian kebebasan penyelesaian tugas (Felton (1994) dalam Sinartha dan Riduwan (2014)). Variabel lingkungan kerja diukur menggunakan indikator sifat pekerjaan, tingkat kompetisi dan tekanan kerja (Merdekawati dan Sulistyawati, 2011). Indikator variabel nilai-nilai sosial yaitu kegiatan sosial, interaksi dengan orang lain, hobi di luar pekerjaan, perhatian perilaku, gengsi pekerjaan dan bekerja dengan ahli (Stole (1976) dalam Rahayu,dkk (2003)). Indikator variabel pertimbangan pasar kerja antara lain tersedianya

lapangan kerja, keamanan kerja, fleksibilitas karier dan kesempatan promosi (Wheeler (1983) dalam Sinartha dan Riduwan (2014)). Variabel Pemilihan Karier Mahasiswa diukur menggunakan indikator konsultan bisnis terpercaya, wawasan dan kemampuan pajak, profesionalisme, promosi jabatan, imbalan dan upaya, kepuasan pribadi, keamanan kerja dan pengharapan masyarakat (Felton, 1994). Pembatasan masalah dilakukan karena adanya keterbatasan waktu penelitian. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan S1 akuntansi di Universitas yang ada di Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang perpajakan?
2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang perpajakan?
3. Apakah terdapat pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang perpajakan?
4. Apakah terdapat pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang perpajakan?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai hubungan variabel – variabel nilai intrinsik pekerjaan, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 akuntansi di bidang perpajakan.
 - b. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah referensi sebagai penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan karier mahasiswa akuntansi.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan bagi Direktorat Jendral Pajak agar dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan penerimaan pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 akuntansi untuk memperhatikan peluang kerja besar yang tersedia di bidang perpajakan di Indonesia.